

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam rangka pengambilan keputusan bagi stakeholders (Masyarakat, DPRD, Lembaga Pengawas, Lembaga Pemeriksa dan Pemerintah Pusat) dalam menilai akuntabilitas serta dalam pengambilan keputusan.

Laporan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun dengan Akuntansi berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah khususnya Lampiran I SAP berbasis Akrual.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2023 yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya dan rencana berikutnya.

Pelaporan keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan pemanfaatan sumber daya ekonomi;
- 2) Menyediakan informasi mengenai ketaatan dan kesesuaian realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan atas sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- 4) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam mengelola keuangan.
- 5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Laporan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

- 1) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 8) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 12) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
- 15) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 16) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 30 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/ Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
- 17) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 18) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 118 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
- 19) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
- 20) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

### **3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Biro Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- A.       PENDAHULUAN
  - 1.       Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 2.       Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
  - 3.       Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD
- B.       IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
  - 1.       Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
  - 2.       Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
- C.       PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
  - 1.       Rincian Dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
    - a.       Laporan Realisasi Anggaran
      - (1)       Pendapatan Daerah
      - (2)       Belanja Daerah
      - (3)       Pembiayaan Neto
    - b.       Laporan Operasional
      - (1)       Pendapatan – LO
      - (2)       Beban – LO
    - c.       Neraca
      - (1)       Aset
      - (2)       Kewajiban
      - (3)       Ekuitas
    - d.       Laporan Perubahan Ekuitas
  - 2.       Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi yang menggunakan Basis Akrual.

D. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

1. Penggantian Manajemen Pemerintahan selama setahun berjalan
2. Kesalahan Manajemen Terdahulu Yang Telah Dikoreksi Oleh Manajemen
3. Komitmen atau Kontijensi yang Tidak Dapat disajikan oleh Neraca
4. Penggabungan atau Pemekaran Entitas Tahun Berjalan
5. Kejadian yang Mempunyai Dampak Sosial yang Harus ditanggulangi/ diselesaikan oleh Pemerintah, dan/ atau
6. Pengungkapan yang diwajibkan Dalam Tiap Standar Yang Berlaku Sebagai Pelengkap

E. PENUTUP

## B. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

#### 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam hal :

- a. melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah;
- e. melaksanakan tugas Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembangunan.

#### 1.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Nomor. DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.06.0000/001/2023, tanggal 1 Januari 2023, mendapat plafon anggaran sebesar Rp. 16.150.779.000,00 dan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Nomor. DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.06.0000/001/2023, tanggal 7 November 2023 sebesar Rp. 16.769.591.000,00. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dapat ditunjukkan sebagai berikut :

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	Realisasi
Belanja Operasi	16.396.918.000	16.567.721.651	(1.925.820.119)	18.493.541.770,00
Belanja Modal	372.673.000	365.671.500	93.345.942	272.325.558,00
Total	16.769.591.000	16.567.721.651	(1.832.474.177)	18.765.867.328,00

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Biro Administrasi Pembangunan tidak memiliki Target Pendapatan.

## 2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam rangka realisasi anggaran belanja pada tahun anggaran 2023, beberapa kondisi baik yang sudah dapat terprediksi maupun diluar perkiraan yang menjadi faktor berpengaruh pada pengeluaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan sehingga terdapat beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya kurang dari 89% namun pada pelaksanaannya kegiatan telah selesai dilaksanakan sebesar 100% dan fisik pekerjaan sebesar 100%. Realisasi telah sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan barang/ jasa pada penyedia sebagaimana terlampir pada laporan keuangan AK-31C.

**C. PENJELASAN POS-POS KEUANGAN SKPD****RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD****1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan-LRA, surplus/ defisit-LRA dan pembiayaan dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun. Laporan Realisasi Anggaran disusun

Uraian	TA 2023			TA 2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pendapatan-LRA	0	6.162.500	6.162.500	0
Belanja	16.769.591.000	16.567.721.651	(2.198.145.677)	18.765.867.328
Transfer	0	0	0	0
<b>Surplus/ (Defisit)-LRA</b>	<b>0</b>	<b>(16.561.559.151)</b>	<b>2.204.308.177</b>	<b>(18.765.867.328)</b>
Pembiayaan	0	0	0	0
<b>Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>16.769.591.000</b>	<b>(16.561.559.151)</b>	<b>2.204.308.177</b>	<b>(18.765.867.328)</b>

**1) Pendapatan - LRA**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor. 118 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi. Terdapat Pendapatan (Penyetoran atas pengembalian kelebihan belanja atas tahun kemarin) sebesar Rp. 6.162.500 merupakan pengembalian pengembalian belanja Honorarium Tim TEPRAs dan Tim DAK Fisik Pemprov Jatim an. Adhy Karyono, A.KS., M - Pengembalian Belanja Honorarium Tim TEPRAs dan Tim DAK Fisik Pemprov Jatim an. Adhy Karyono, A.KS., M.AP Tahun Anggaran 2022.

**2) Belanja Daerah**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi. Realisasi Belanja TA 2023 adalah sebesar Rp. 16.567.721.651,00 atau mencapai 98,80% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 16.769.591.000,00. Realisasi TA 2023 lebih rendah Rp. 2.198.145.677,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 tetapi secara persentase realisasi TA 2023 naik sebesar 1,49% dikarenakan terdapat penurunan Anggaran sebesar Rp. 1.996.276.328,00. Rincian realisasi Belanja adalah sebagai berikut :

Uraian	TA 2023			TA 2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Belanja Operasi	16.396.918.000	16.567.721.651	(1.925.820.119)	16.396.918.000,00
Belanja Modal	372.673.000	365.671.500	93.345.942	272.325.558,00
<b>Total</b>	<b>16.769.591.000</b>	<b>16.567.721.651</b>	<b>(1.832.474.177)</b>	<b>18.765.867.328,00</b>

### Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 adalah sebesar Rp. 16.202.050.151,00 atau mencapai 98,81% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 16.396.918.000,00. Realisasi TA 2023 lebih kecil Rp. 1.832.474.177,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Rincian realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

Uraian	TA 2023			TA 2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Belanja Pegawai	5.650.161.000	5.549.824.554	(100.336.446)	5.497.002.808,00
Belanja Barang dan Jasa	10.746.757.000	10.652.225.597	(94.531.403)	12.996.538.962,00
<b>Total</b>	<b>16.396.918.000</b>	<b>16.202.050.151</b>	<b>(194.867.849)</b>	<b>16.396.918.000,00</b>

### Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 adalah sebesar Rp. 365.671.500,00 atau mencapai 98,12% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 372.673.000,00. Realisasi TA 2023 lebih besar Rp. 93.345.942,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Rincian realisasi Modal adalah sebagai berikut :

Uraian	TA 2023			TA 2022
	APBD Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	372.673.000	365.671.500	93.345.942	272.325.558,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>372.673.000</b>	<b>365.671.500</b>	93.345.942	<b>272.325.558,00</b>

### 3) Pembiayaan Neto

Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan adalah penerimaan/ pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/ atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun tahun berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pada Biro Administrasi Pembangunan tidak memiliki pembiayaan.

## 2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca dapat digambarkan sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Aset	3.516.327.334,62	3.956.304.182,00
Kewajiban	0	0,00
Ekuitas	3.516.327.334,62	3.956.304.182,00

### 1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Rincian Aset adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Aset Lancar	117.318.548,62	71.934.715,00
Aset Tetap	1.806.638.724	1.988.821.783,00
Aset Lainnya	1.592.370.062	1.895.547.684,00
<b>Aset</b>	<b>3.516.327.334,62</b>	<b>3.956.304.182,00</b>

Berdasarkan rincian Aset diatas terlihat bahwa secara umum terjadi penurunan Aset pada Biro Administrasi Pembangunan.

#### 1.1. Aset Lancar

Rincian Aset Lancar adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kas dan Setara Kas	0	0,00
Persediaan	117.318.548,62	71.934.715,00
<b>Aset Lancar</b>	<b>117.318.548,62</b>	<b>71.934.715,00</b>

Saldo Aset Lancar Biro Administrasi Pembangunan berupa Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar **117.318.548,62 dan 71.934.715,00**.

## 1.2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Peralatan dan Mesin	32.372.171.395,00	31.449.099.895,00
Aset Tetap Lainnya	26.675.000,00	26.675.000,00
Akumulasi Penyusutan	(30.592.207.671,00)	(29.486.953.112,00)
<b>Aset Tetap</b>	<b>1.806.638.724,00</b>	<b>1.988.821.783,00</b>

Aset Tetap dinilai menggunakan metode harga perolehan (Acquisition Cost) dan sudah memperhitungkan penyusutan (depreciation).

### 1.2.1. Peralatan dan Mesin

Berikut merupakan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Biro Administrasi Pembangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Peralatan dan Mesin	32.372.171.395,00	31.449.099.895,00

Selama TA 2023 terdapat penambahan sebesar Rp. 923.071.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penambahan Selama Tahun Anggaran dari Belanja Modal sebesar Rp. 365.671.500,00.
2. Mutasi pengalihan penambahan asset masuk sebanyak 1 unit Kendaraan Dinas dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air sebesar Rp.557.400.000,00.

### 1.2.2. Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	26.675.000,00	26.675.000,00

Berikut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Biro Administrasi Pembangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Selama TA 2023 tidak terdapat penambahan ataupun pengurangan.

### 1.2.3. Akumulasi Penyusutan

Berikut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan yang dimiliki Biro Administrasi Pembangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(33.741.571.291,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan		(88.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(39.174.300,00)
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>(29.486.953.112,00)</b>

Selama TA 2023 terdapat penambahan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. 1.105.254.559,00.

### 1.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.592.370.062,00 sedangkan saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.895.547.684,00 atau berkurang sebesar Rp. 303.177.622,00. Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	3.422.327.500,00	3.422.327.500,00
Aset Lain-lain	1.365.637.722,00	1.365.637.722,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.639.923.162,00	(2.336.745.540,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(55.5671.998,00)	(55.5671.998,00)
<b>Aset Lainnya</b>	<b>1.592.370.062,00</b>	<b>1.895.547.684,00</b>

Aset Lainnya dinilai menggunakan metode harga perolehan (Acquisition Cost) dan sudah memperhitungkan penyusutan (depreciation).

#### 1.3.1. Aset Tidak Berwujud

Berikut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Biro Administrasi Pembangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Aset Tidak Berwujud Lainnya	3.422.327.500,00	3.422.327.500,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.639.923.162,00)	(2.336.745.540,00)
<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>782.404.338,00</b>	<b>1.085.581.960,00</b>

Selama Tahun 2023 tidak terdapat penambahan Aset Tidak Berwujud Lainnya tetapi nilainya berkurang sebesar Rp. 303.177.622,00 dibandingkan Tahun 2022 karena Penambahan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

### 1.3.2. Aset Lain-Lain

Berikut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang dimiliki Biro Administrasi Pembangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Aset Lain-lain	1.365.637.722,00	1.365.637.722,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(555.671.998,00)	(555.671.998,00)
<b>Aset Lain-lain</b>	<b>809.965.724,00</b>	<b>809.965.724,00</b>

Pada TA 2023 tidak terdapat penambahan maupun pengurangan pada Aset Lain-Lain.

## 2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi. Rincian Kewajiban pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kewajiban	0,00	0,00
<b>Kewajiban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Biro Administrasi Pembangunan tidak memiliki kewajiban Sejak awal tahun 2022.

## 3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi. Rincian Ekuitas pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Ekuitas	20.963.783.333)	24.195.324.916,00
Surplus/Defisit-LO	(17.447.455.998,38)	(20.239.020.734,00)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>3.516.327.334,62</b>	<b>3.956.304.182,00</b>

Jumlah Ekuitas yang dimiliki oleh Biro Administrasi Pembangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 3.516.327.334,62,00 dan 31 Desember 2022 sebesar 3.956.304.182,00.

### 3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama 1 (satu) periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan OPD Non BLUD, sehingga tidak menyajikan Laporan Arus Kas.

### 4. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-Laporan Operasional, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dapat digambarkan sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	6.162.500,00	0,00
Beban Operasi	17.453.618.498,38	20.239.020.734,00
Beban Penyusutan Amortisasi	1.296.952.181,00	1.680.973.989,00
<b>Jumlah Beban Daerah</b>	<b>17.453.618.498,38</b>	<b>20.239.020.734,00</b>
<b>Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional</b>	<b>17.447.455.998,38</b>	<b>20.239.020.734,00</b>

#### 1) Beban Operasi

Beban operasi adalah besarnya beban yang digunakan untuk membiayai kebutuhan dalam rangka menjalankan pemerintahan. Beban Operasi dapat digambarkan sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban Pegawai	5.549.824.554,00	5.497.002.808,00
Beban Barang dan Jasa	10.606.841.763,38	13.061.043.937,00
<b>Beban Operasi</b>	<b>17.453.618.498,38</b>	<b>20.239.020.734,00</b>

Beban operasi yang telah dimanfaatkan oleh Biro Administrasi Pembangunan selama tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 17.453.618.498,38 sedangkan jumlah beban yang dimanfaatkan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 20.239.020.734,00 atau terdapat penurunan sebesar Rp. 2.785.402.235,62/ -13,76% dikarenakan penurunan alokasi anggaran.

## 2) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah banyaknya penggunaan penurunan nilai asset baik berwujud (penyusutan) maupun tidak berwujud (amortisasi). Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat digambarkan sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>1.296.952.181,00</b>	<b>1.680.973.989,00</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi selama tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 1.296.952.181,00 sedangkan jumlah beban yang dimanfaatkan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.680.973.989,00 atau terdapat penurunan sebesar Rp. 384.021.808,00/ -22,85% dikarenakan penurunan dan berkurangnya nilai aset yang dikelola.

## 5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Maka dari itu, sebagai instansi pemerintah, BLUD kemudian menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). BLUD pun wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas aktivitas operasional yang dilakukannya selama satu periode. Selain itu, Laporan Keuangan ini juga memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban BLU pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLUD dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang.

Biro administrasi Pembangunan Bukanlah Perangkat Daerah BLUD sehingga tidak Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

## 6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dapat digambarkan sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Ekuitas Awal	3.956.304.182,00	5.429.457.588,00
Surplus/ (Defisit)-LO	(17.447.455.998,38)	(20.239.020.734,00)
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	16.561.559.151,00	18.765.867.328,00
Dampak Kumulatif Kebijakan/ Penyesuaian Ekuitas	445.920.000,00	0,00
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>3.516.327.334,62</b>	<b>3.956.304.182,00</b>

### 6.1. Ekuitas Awal

Selama Tahun 2023 terdapat pengurangan sebesar Rp. 1.473.153.406,00 perbandingan Ekuitas Awal dapat digambarkan sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Ekuitas Awal	3.956.304.182,00	5.429.457.588,00

### 6.2. Surplus/ (Defisit)-LO

Selama Tahun 2023 terdapat pengurangan sebesar Rp. 2.791.564.735,62. Perbandingan Surplus/ (Defisit)-LO dapat digambarkan sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Surplus/ (Defisit)-LO	(17.447.455.998,38)	(20.239.020.734,00)

### 6.3. Ekuitas untuk dikonsolidasikan

Selama Tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp. 2.204.308.177,00. Perbandingan Ekuitas untuk dikonsolidasikan dapat digambarkan sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	16.561.559.151,00	18.765.867.328,00

#### 6.4. Dampak Kumulatif Kebijakan/ Penyesuaian Ekuitas

Selama Tahun 2023 terdapat penambahan, Dampak Kumulatif Kebijakan/ Penyesuaian Ekuitas yang berasal dari mutasi pengalihan penambahan kendaraan Dinas dari Dinas PU Sumber Daya Air sebesar Rp. 557.400.000,00 dikurangi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp. 111.480.000,00 yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	445.920.000,00	0,00

#### 6.5. Ekuitas Akhir

Perbandingan Ekuitas Akhir dapat digambarkan sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Ekuitas Akhir	<b>3.516.327.334,62</b>	<b>3.956.304.182,00</b>

## D. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

### 1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur beserta jenjang struktural dibawahnya merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Tahun Anggaran 2023, entitas akuntansi pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur meliputi :

No.	Bagian	Jumlah Sub Bagian
1.	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Sub Bagian
2.	Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	3 Sub Bagian
3.	Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Sub Bagian
	Jumlah	9 Sub Bagian

Sedangkan penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang meliputi pencatatan barang milik daerah (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan akun laporan neraca dilakukan oleh pembantu pengurus barang aset dan pembantu pengurus barang persediaan, yang meliputi :

No.	Pengelola BMD	Jumlah
1.	Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	1
2.	Pejabat Penatausahaan Barang Aset Milik Daerah	1
3.	Pejabat Penatausahaan Barang Persediaan Non Medis	1
4.	Pembantu Pengurus Barang Aset	1
5.	Pembantu Pengurus Barang Persediaan Non Medis	1
	Jumlah	5

## **2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Provinsi Jawa Timur adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Sebagaimana pemerintah daerah lainnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran tergantung pada selisih realiasi penerimaan, pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dari pembiayaan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan terpaku pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

## **3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 adalah Harga Perolehan.

## **4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standard Akuntansi Pemerintahan**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas pos-pos Laporan Keuangan seluruhnya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penyusutan aset tetap di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah diterapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013.

## **BAB VII PENUTUP**

Penyusunan Laporan Keuangan 2023 Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur disusun dengan basis akrual yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 118 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dengan disusunnya Catatan atas Laporan Keuangan ini, diharapkan dapat menyajikan informasi bagi pihak eksternal maupun internal dan sekaligus menjadi dokumen dalam pengambilan keputusan.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.